

ABSTRAK

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kota Bogor yang di atur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 mengatur mengenai tata cara penataan PKL, yang dilakukan melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL. Dimana dalam praktik terjadi penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor karena aktivitas PKL tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya ruang publik yang mulai terganggu seperti berkurangnya hak pengguna jalan karena PKL cenderung berjualan di luar bangunan, trotoar dan badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lainnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kawasan Pasar Anyar Kota Bogor dan mengetahui upaya Pemerintah dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya menggunakan deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data yuridis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat diterapkan secara maksimal khususnya dalam menata pedagang kaki lima di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor diantaranya dapat dilihat dari faktor aturan yaitu Peraturan tersebut sebagian dapat diterapkan namun sebagian lagi belum dapat diterapkan terutama dalam hal penataan pedagang kaki lima. Selain itu upaya Pemerintah yang dapat dilakukan dalam penataan PKL kawasan Pasar Anyar Kota Bogor yaitu Pemerintah baru berhasil melakukan penertiban para PKL yang berada di JL. Dewi Sartika dan merelokasikan ke JL. Nyi Raja Permas serta ke dalam Pasar Anyar, kemudian pemerintah telah melakukan simulasi perubahan jalur angkot trayek 10 dan 12 di kawasan Pasar Anyar.

Kata kunci : PKL, Penataan, Upaya Pemerintah

ABSTRACT

The structuring and empowerment of Bogor City street vendors governed by the provisions of Bogor City Regulation Number 11 Year 2019 regulates the procedures for arranging street vendors, which are carried out through the establishment of fostered locations to determine, move, regulate and erase street vendors locations. Where in practice there is an orderliness of street vendors in the Anyar market area of Bogor City because the street vendors' activities cause several problems including public spaces that are beginning to be interrupted such as reduced user rights because street vendors tend to sell outside buildings, sidewalks and road bodies so that they interfere with other activities. Therefore this study aims to determine the implementation of Bogor City Regulation No. 11 of 2019 concerning Structuring and Empowering Street Vendors of the Bogor City Anyar Market area and to know the Government's efforts in structuring the street vendors of the Anyar Market of Bogor City based on Bogor City Regulation No. 11 2019 concerning Structuring and Empowering Street Vendors.

The research method used in this study is a normative juridical approach, with research specifications using descriptive analysis and qualitative juridical data collection techniques.

The results of this study found that the Implementation of Bogor City Regulation Number 11 Year 2019 Structuring and Empowering Street Vendors could not be implemented optimally, especially in managing street vendors in the Anyar Market area of Bogor City which can be seen from the factor of the rule that the Regulations partly can be applied but some of it can not be applied especially in terms of structuring street vendors. In addition, the Government's efforts that can be done in structuring street vendors in the Anyar Market in Bogor City, namely the new Government, succeeded in controlling the street vendors who are in JL. Dewi Sartika and relocated to JL. Nyi Raja Permas and into the Anyar Market, then the government has carried out a simulation of changing the route of the 10 and 12 route public transportation in the Anyar Market area.

Keywords: PKL, Arrangement, Government Efforts